

DIALOG TERSTRUKTUR UNTUK PEMUDA: REKOMENDASI UNTUK REALISASI KOMUNITAS ASEAN 2015 DI INDONESIA

Felix Sharief

Abstract

One of the mandates set out in ASEAN Charter, ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint and the vision of Indonesia's Chairmanship in 2011 is to have a more people-oriented of ASEAN. The youth may the society and act as an agents of change in this nation have a significant role in achieving this goal. European Union as ASEAN's aspiration for regional integration has been using a mechanism of structured dialogue to bolstering young people engagement in whole sectors. Structured dialogue aims to discuss chosen themes with young people, in order to obtain results which are useful for policy-making. This paper will review the possibility of such mechanism to be implemented in Indonesia.

Keywords : ASEAN, people-oriented, community, youth engagement, EU, structured dialogue.

Pendahuluan

Tepat pada 8 Agustus 2013, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), yang adalah perhimpunan bangsa-bangsa se-Asia Tenggara (ASEAN) genap berusia 46 tahun. Dalam usia yang tidak bisa dibilang muda lagi, ASEAN telah menjelma menjadi organisasi kawasan yang dihormati di kancah internasional. Hal ini tercapai dengan kemajuan ekonomi yang tidak terpengaruh oleh iklim ekonomi dunia yang sedang menurun¹ dan peran sentralnya yang terus mendorong stabilisasi kawasan.

Demi terlaksananya kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, ASEAN lewat ambisi besarnya, Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015)² mencanangkan suatu kawasan yang menjamin bebas bergerakanya barang dan modal dalam Komunitas Ekonominya. Sedangkan

¹ Gillian Kwek, (2011), "ASEAN – Resilient Growth Ahead despite the Global Slowdown", *Fund Perspective*, Juni 2011, <http://internetfilesserver.phillip.com.sg/Poems/UnitTrust/Fundview/Fid060711ASEAN.pdf>, diakses 16 Agustus 2013.

² Dimasa Keketuaan Indonesia pada tahun 2003, sepuluh Kepala Negara ASEAN menyetujui pembentukan sebuah komunitas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Bali yang tertera dalam dokumen Bali Concord II. ASEAN Community 2015 terdiri dari tiga pilar utama yang menyatukan seluruh anggota ASEAN. Komunitas ini adalah Komunitas Politik-Keamanan (ASEAN Political-Security Community), Komunitas Ekonomi (ASEAN Economics Community), dan Komunitas Sosial-Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community). Mengenai penjelasan merinci masing-masing Komunitas lihat ASEAN Sekretariat, (2009), *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*, Jakarta: ASEAN Sekretariat, hal. 5. Untuk Deklarasi Bali Concord II lihat ASEAN Sekretariat, (2003), "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)", <http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii>, diakses 17 Agustus 2013.

lewat Komunitas Politik dan Keamanannya, ASEAN mengharapkan kawasan yang damai, adil dan demokratis.³

Tidak bisa dipungkiri bahwa suatu kemajuan kawasan tidak seharusnya dilakukan oleh para Pemerintah saja, namun diperlukan juga dukungan kuat dari masyarakatnya. Peran serta masyarakat dalam memberi masukan, aktif dalam menyampaikan kritik membangun sangat penting demi terciptanya suatu kawasan yang berorientasi kemasyarakatan dan juga terciptanya komunitas yang mampu mengakomodir kepentingan khalayak yang lebih luas. Dengan itu, untuk mendukung tercapainya integrasi ekonomi kawasan, ASEAN juga mengenalkan Komunitas Sosial-Budaya.

Lewat Komunitas ini, ASEAN menginginkan kerjasama di bidang kepemudaan, perempuan, lingkungan hidup, teknologi, kepegawaian, penerangan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, penanggulangan bencana alam, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan serta yayasan ASEAN.⁴ Hal ini sesuai dengan ASEAN Charter yang memuat berbagai kerjasama fungsional sebagai mana berbunyi: *“..enhance good governance and the rule of law, protection of the region’s environment, preservations of its cultural heritage, cooperation in education and science and technology and drugs-free environment”*⁵.

Dalam bidang kepemudaan, sebetulnya ASEAN lewat ASEAN Foundation sudah memiliki beberapa kegiatan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam cetak biru Komunitas Sosial-Budaya, namun beberapa kegiatan tersebut hanya mencakup sub-bidang pertukaran kebudayaan dan mempromosikan Komunitas ASEAN yang berbasis pada proyek.⁶

Dengan demikian, keikutsertaan pemuda dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan diarah ASEAN masih belum terfasilitasi. Mengingat majemuknya masyarakat di Asia Tenggara dan masih banyaknya negara anggota yang menganggap bahwa pengambilan keputusan merupakan wewenang penuh pemerintahnya, seperti Vietnam dan Laos yang pemerintahannya sangat sentralistis. Indonesia sebagai salah satu negara yang demokratis di kawasan dapat merangkul kaum muda untuk dapat berpartisipasi dalam hal ini.

Seiring dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-68 dan sebagai warga negara tentu kita tidak asing lagi dengan kutipan kata

³ ASEAN Secretariat, (2009), *ASEAN Political-Security Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat, hal. 1.

⁴ Tundjung Linggarwati, (2012, 26 September), *ASEAN Socio-Cultural Community: Peluang Bagi Pengembangan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal*, Seminar nasional “Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal”, Purwokerto.

⁵ Lihat *Article 1* (Pasal 1) ASEAN *Charter*. ASEAN Secretariat, (2008), *ASEAN Charter*, Jakarta: ASEAN Secretariat, hal. 3-5.

⁶ Lihat ASEAN Foundation, “Social Development”, http://www.aseanfoundation.org/index2.php?main=social_sub.php&sCatID=0111, diakses 25 November 2013.

dari Presiden Soekarno: “*Beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia*”. Kalimat tersebut menegaskan betapa pentingnya peran pemuda dalam kemajuan bangsa dan negara. Namun seiring dengan tuntutan berperan aktif di kancah global dan regional, peran besar kaum muda dalam agenda-agenda kawasan sangat dibutuhkan. Sehingga pemuda Indonesia dalam meningkatkan pemahaman peran serta masyarakat khususnya untuk mendukung upaya pembentukan Komunitas ASEAN menjadi sangat krusial. Sejatinya untuk terus mendorong Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang bukan sekedar urusan pemerintah semata akan tetapi memerlukan partisipasi masyarakatnya pula. Dorongan Indonesia ini kelak dapat menyebar ke negara-negara ASEAN lainnya.

ASEAN merupakan organisasi regional tersukses kedua setelah Uni Eropa⁷ dan merupakan organisasi regional paling sukses di antara negara-negara berkembang⁸. Walaupun integrasi Uni Eropa jauh berbeda dari konteks ASEAN, namun mantan Sekretaris-Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan mengatakan bahwa Uni Eropa merupakan model aspirasi bagi ASEAN.⁹ Sehingga berguru kepada Uni Eropa merupakan hal yang sepatutnya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memandang suatu permasalahan regional¹⁰, tidak terkecuali dalam upaya peningkatan partisipasi kaum muda di berbagai bidang. Uni Eropa menitikberatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusannya termasuk partisipasi dari publik pemudanya.¹¹

Komisi Uni Eropa (European Commission) sebagai badan eksekutif Uni Eropa dan pemerintah negara anggota masing-masing memiliki program yang disebut dengan Dialog Terstruktur (Structured Dialogue). Program itu mengajak kawula muda Eropa untuk duduk bersama dengan para pemangku kepentingan Uni Eropa untuk membahas tema-tema yang

⁷Tommy Koh, (2007), “ASEAN at 40: Perception and Reality”, *PacNet* (48A), <http://csis.org/files/media/isis/pubs/pac0748a.pdf>, diakses 16 Agustus 2013, hal. 1.

⁸ Helen E. S. Nesadurai, (2008), “The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)”, *New Political Economy* 13 (2), hal. 225.

⁹ Stanley Weiss, (2011), “ASEAN, the EU and the End of Westphalia”, http://www.huffingtonpost.com/stanley-weiss/asean-the-eu-and-the-end-b_944812.html, diakses 25 November 2013.

¹⁰ Penulis memahami bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan antara regionalisme Eropa dan Asia Tenggara, terutama dalam hal nilai dan cara pandang terhadap institusi regionalnya. Disini Uni Eropa dilihat sebagai model organisasi regional yang sukses dalam membangun komunitas yang berkemasyarakatan. Lihat Elenita Dano, (2008), *Building People Oriented and Participatory Alternative Regionalism Models in Southeast Asia: an Exploratory Study*, http://asiadhr.org/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/alternative_regionalism.pdf, diakses 18 Agustus 2013.

¹¹ Untuk mendapatkan gambaran umum partisipasi publik dalam pengambilan keputusan di badan Uni Eropa lihat Guido Benny, (2012), “Public Perception in Indonesia on the Obstacles for Establishing the ASEAN Community”, *International Journal on Social Science Economics and Art* 2 (3), hal. 30-31.

dianggap penting demi mendapatkan hasil yang berguna untuk pembuatan kebijakan.¹²

Tinjauan Dialog Terstruktur dalam Skema Uni Eropa

Dialog Terstruktur merupakan instrumen yang ditujukan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Uni Eropa memenuhi kebutuhan dan harapan kaum muda. Dalam dialog ini bersama dengan pemuda serta organisasi pemuda, pembuat kebijakan mendiskusikan dan memberi masukan kebijakan di tingkat nasional dan regional.

Dengan demikian, Dialog Terstruktur merupakan proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mengamankan hasil politik melalui kebijakan bersama orang muda dan pembuat kebijakan. Menurut Resolusi Dewan Uni Eropa pada 2009 mengenai Kerangka Kerjasama Kepemudaan, Dialog Terstruktur antara institusi-institusi Uni Eropa dengan kaum muda dan organisasi pemuda berfungsi sebagai forum untuk merefleksikan kontinuitas pelaksanaan dan tindak lanjut kerjasama Uni Eropa di bidang kepemudaan.¹³

Pada Konferensi Pemuda Uni Eropa (EU Youth Conferences), yang diselenggarakan oleh negara Kepresidenan Uni Eropa, dan Pekan Kepemudaan Eropa (European Youth Weeks), digelar oleh Komisi Eropa, Dialog Terstruktur melibatkan konsultasi dengan kaum muda dan organisasi kepemudaan di semua tingkat di negara-negara anggota Uni Eropa.

Dialog terstruktur diimplementasikan dalam siklus kerja selama 18 bulan dan memiliki isu-isu tematik tersendiri. Setiap siklus kerja dibagi menjadi tiga putaran setiap enam bulan konsultasi dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan (Implementation Plan) yang disepakati oleh Tim Kepresidenan, Komisi, dan Forum.¹⁴

Melalui Dialog Terstruktur, kaum muda dan organisasi pemuda bisa mengutarakan rekomendasinya langsung ke pengambil keputusan dan dengan demikian berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan pemuda yang mempengaruhi mereka. Oleh karena itu, dengan mengambil bagian dalam kegiatan ini, orang-orang muda tidak hanya memberi masukan ke

¹² European Commission, (2013), "Structured Dialogue", http://ec.europa.eu/youth/focus/structured-dialogue_en.htm, diakses 16 Agustus 2013.

¹³ European Federation for Intercultural Learning, (2012), "EU Structured Dialogue with Young People", <http://www.efil.afs.org/advocacy/advocacy-actions/eu-structured-dialogue-with-young-people/>, diakses 18 Agustus 2013. Untuk Resolusi Dewan Uni Eropa mengenai Kerangka Kerjasama Kepemudaan tahun 2009 lihat Council of the European Union, (2009), "Council Resolution of 27 November 2009 on a Renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)", http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf, diakses 18 Agustus 2013.

¹⁴ European Federation for Intercultural Learning, *Ibid.* Kepresidenan disini adalah negara yang memegang keketuaan di Uni Eropa atau sama dengan istilah *Chairmanship* dalam lingkup keketuaan di ASEAN.

dalam kebijakan di tingkat nasional dan regional, tetapi juga menjunjung tinggi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, eksistensi pemuda disini diakui sebagai aset berharga bagi masyarakat.¹⁵

Untuk menjalankan Dialog Terstruktur, terdapat dua lembaga yang berperan yaitu Kelompok Kerja Nasional (National Working Groups) dan Komite Pengarah Eropa (European Steering Committee). Di tingkat nasional, Kelompok Kerja Nasional melakukan konsultasi dengan kaum muda dan organisasi pemuda di tingkat lokal, nasional, dan regional di setiap negara anggota Uni Eropa. Sedangkan di tingkat regional, Komite Pengarah Eropa berfungsi sebagai badan koordinator untuk mendukung, memantau, dan mengkomunikasikan proses yang berlangsung. Forum Pemuda Eropa (Youth Forum) bertugas sebagai ketua dan berfungsi sebagai sekretariat dari komite ini, sedangkan negara ketua Uni Eropa bertugas sebagai wakil ketua.¹⁶

Dialog Terstruktur bekerja di tingkat lokal, nasional dan regional yang diatur dalam siklus. Setiap siklus berfokus pada satu prioritas tematik yang dipilih oleh ketua di masing-masing tingkatan dan disetujui oleh Dewan Muda Kementerian (Youth Council of Ministers). Kemudian, Komite Pengarah Eropa akan melakukan pembicaraan dengan perwakilan kaum muda untuk menentukan arah dari konsultasi.¹⁷

Dalam prakteknya, Dialog Terstruktur bekerja dalam dua tingkatan yaitu konsultasi dan konferensi. Konsultasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerjasama Nasional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang kepemudaan dimasing-masing negara Uni Eropa untuk menjangkau kaum muda sebanyak mungkin dan memastikan konsultasi dapat mengakomodir suara pemuda secara menyeluruh. Hasil dari konsultasi ini dilaporkan ke Komite Pengarah Eropa yang kemudian disusun secara sistematis dan berfungsi sebagai dasar umum untuk berdiskusi dalam konferensi.¹⁸

Sedangkan konferensi diselenggarakan oleh negara kepresidenan Uni Eropa setiap enam bulan. Pada konferensi, delegasi pemuda dan pembuatan kebijakan membahas hasil konsultasi berdasarkan temanya masing-masing. Berdasarkan hasil kompilasi dari konsultasi, perwakilan pemuda dan pembuat kebijakan akan menghasilkan Rekomendasi Bersama (Joint Recommendations) yang relevan dengan prioritas Dialog Terstruktur dan proses pembuatan kebijakan Eropa di bidang kepemudaan. Kemudian,

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* Sebagai contoh, ditahun 2012 isu tematiknya adalah partisipasi pemuda dalam kehidupan berdemokrasi di Uni Eropa. Lihat Council of the European Union, (2012), "Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, Meeting within the Council, on the Overview of the Structured Dialogue with Young People on Youth Participation in Democratic Life in Europe", <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st15/st15647.en12.pdf>, diakses 18 Agustus 2013.

¹⁸ *Ibid.*

masing-masing hasil konferensi akan diadopsi dalam satu set Rekomendasi Bersama oleh perwakilan pemuda dan institusi Uni Eropa.¹⁹

Mengaplikasikan Dialog Terstruktur di Indonesia

Struktur dan mekanisme Dialog Terstruktur buatan Uni Eropa tentu tidak dapat diimplementasikan secara menyeluruh sama di Indonesia. Mengingat apa yang dilakukan oleh Uni Eropa berada di level regional dan apa yang akan dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia adalah bersifat lokal dan nasional. Sebelum menarik skenario pengimplementasian diperlukan lembaga koordinasi untuk mengakomodir perwakilan kaum muda di tingkat nasional.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai lembaga ujung tombak di negeri ini dalam hal ASEAN diharapkan dapat bertindak sebagai koordinator pemerintah untuk mengorganisir Dialog Terstruktur. Selanjutnya, Kemenlu diharapkan melakukan konsultasi dengan organisasi kepemudaan dalam negeri untuk menentukan status badan yang akan merepresentasikan keterwakilan pemuda Indonesia untuk berdialog dengan pihak pemerintah. Sekaligus dalam konsultasi tersebut diharapkan suatu organisasi pemuda yang bersifat forum atau konsorsium dapat terbentuk sekaligus dengan sekretariatnya untuk mengakomodir hal-hal yang bersifat administratif. Diperlukan juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah di setiap provinsi untuk mengajak partisipasi kaum muda dan organisasi pemuda yang memiliki perhatian terhadap masalah ASEAN. Hal ini juga diperlukan untuk mengakomodir suatu pemuda yang lebih luas dan bervariasi.

Di sini Pemerintah dapat menggunakan Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan²⁰ sebagai dasar dari mengajak peran aktif pemuda untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik ASEAN di tingkat Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan peran pemuda dalam kehidupan berbangsa. Komunikasi awal dengan perwakilan Delegasi Uni Eropa di Jakarta juga patut dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kegiatan ini dan saran dalam implementasinya.

Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Uni Eropa, Dialog Terstruktur apabila ingin diterapkan di Indonesia seharusnya berjalan sesuai dengan tema-tema besar yang sedang digalakan oleh pemerintah, atau tema yang sedang hangat dikalangan masyarakat, sebagai contoh isu penanganan asap lintas negara di ASEAN. Tema-tema besar tersebut diharapkan memiliki sub-tema agar pembahasan ditingkat konferensi menjadi lebih spesifik. Penentuan tema merupakan subjek kewenangan Kemenlu dan memerlukan persetujuan dari tiap-tiap panitia lokal kepemudaan di daerah.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Indonesia, (2009), *Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.*

Kemenlu juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga negara lainnya tergantung dari tema yang akan dibahas. Dalam Dialog Terstruktur Uni Eropa, tema yang diambil adalah isu yang lebar sehingga dapat meningkatkan partisipasi yang luas dipihak pengambil keputusan.

Dialog Terstruktur dalam skenarionya di Indonesia dapat dengan implementasikan dengan pembentukan panitia lokal dimasing-masing provinsi. Panitia lokal berfungsi sebagai wadah bagi berbagai organisasi kepemudaan untuk menyalurkan aspirasinya. Dalam pembentukannya, panitia lokal terdiri dari gabungan perwakilan-perwakilan organisasi kepemudaan dimasing-masing daerah yang dimana ketuanya dipilih secara demokratis. Sedangkan dalam melaksanakan fungsinya, panitia lokal harus menyaring isu-isu yang mewakili tiga pilar ASEAN. Secara sederhana, inspirasi pembentukan panitia lokal dapat dilihat dalam pelaksanaan kongres partai politik di Indonesia yang mewakili suara masing-masing daerah yang diteruskan ke pusat (**Bagan 1**).

Setelah panitia lokal terbentuk dan perwakilan dari masing-masing daerah telah disetujui ditingkat lokal dan terbentuknya perwakilan kepemudaan ditingkat nasional, maka persiapan selanjutnya adalah konferensi – perwakilan ditingkat nasional dapat disebut sebagai delegasi muda nasional. Konferensi merupakan puncak dari partisipasi pemuda dengan para pemangku kepentingan untuk membahas suatu isu dan mengharapkan adanya sumbangan pemikiran, saran, kritik, dan debat dari pemuda terhadap keputusan atau bahasan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini akan tertuang dalam suatu deklarasi. Disarankan konferensi dilaksanakan setiap tahun.

Konferensi berjalan melalui beberapa sesi antara delegasi muda nasional dengan masing-masing pemangku kepentingan tergantung dari sub-tema yang telah ditentukan. Dari setiap sesi antara delegasi muda dengan pemangku kepentingan akan menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang akhirnya disusun dalam deklarasi (**Bagan 2**).

Untuk memastikan bahwa suara kaum muda yang tertera dalam Deklarasi diperhatikan oleh pemerintah, di konferensi selanjutnya harus disiapkan sesi dialog antara kedua belah pihak untuk membahas tindaklanjut dari Deklarasi yang telah dibuat sebelumnya.

Terkait dengan permasalahan operasional, Dialog Terstruktur merupakan suatu kegiatan yang sangat transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta berdampak signifikan bagi peningkatan peranan pemuda dan mendukung proses *good-governance* di negeri ini. Sehingga disarankan apabila Dialog Terstruktur ingin dilaksanakan, kegiatan ini bisa didukung dari Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kemenlu. Opsi lain yang bisa dilihat juga melalui donor asing.

Kesimpulan

Melihat jumlah penduduk muda Indonesia yang mencapai 26% dari total penduduk Indonesia dan fakta-fakta pemuda sebagai agen perubahan, penentu masa depan bangsa, modal sebagai kekuatan ekonomi-sosial bangsa, serta pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa, kaum muda harus diajak berpartisipasi dalam pembahasan masalah ASEAN didalam negeri serta didengar suaranya sebagai rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah.

Demi mendukung ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat, Pemerintah Indonesia patut melaksanakan dialog terbuka dengan kaum muda untuk mendengarkan pandangannya terhadap isu-isu terkini ASEAN. Uni Eropa sebagai organisasi regional yang sukses memiliki perangkat dialog yang mutakhir untuk mengakomodasi suara penduduk mudanya lewat Dialog Terstruktur. Melalui dialog ini, eksistensi suara kaum muda diakui sebagai aset yang berharga bagi kemajuan bangsa dan negara.

Penulis telah menjabarkan skenario pembentukan Dialog Terstruktur di Indonesia yang cakupannya dari tingkat lokal ke nasional yang terdiri dari representasi kaum muda untuk dipertemukan dengan pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan atau lembaga negara lain. Dialog yang bersifat *bottom-up* ini diharapkan dapat memberikan wadah bagi kaum muda untuk menyalurkan pendapatnya dan diperhitungkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

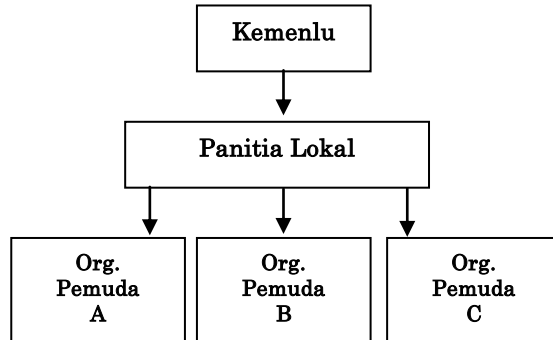
- ASEAN Secretariat. (2013). *ASEAN Annual Report 2012-2013*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2010. *Constructive Engagement: Building a People-Oriented Community*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2009. *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2008. *ASEAN Charter*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. 2003. "Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)". <http://www.asean.org/news/item/declaration-of-asean-concord-ii-bali-concord-ii> diakses 17 Agustus 2013.
- Benny, Guido. 2011. "Public Perception in Indonesia on the Obstacles for Establishing the ASEAN Community". *International Journal on Social Science Economics and Art* 3 (2): 38-44.

- European Commission*. 2012. "Structured Dialogue". http://ec.europa.eu/youth/focus/structured-dialogue_en.htm diakses 16 Agustus 2013.
- Cheng Guan, Benny Teh. 2004. "ASEAN's Regional Integration Challenge: The ASEAN Process". *The Copenhagen Journal of Asian Studies* (20): 70-94.
- Chesterman, Simon. 2008. "Does ASEAN Exist? The Association of Southeast Asian Nations as an International Legal Person". *The Singapore Year Book of International Law* (9): 199-211.
- Council of the European Union*. 2012. "Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, Meeting within the Council, on the Overview of the Structured Dialogue with Young People on Youth Participation in Democratic Life in Europe". <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st15/st15647.en12.pdf> diakses 18 Agustus 2013.
- Council of the European Union*. 2009. "Council Resolution of 27 November 2009 on a Renewed Framework for European Cooperation in the Youth Field (2010-2018)". http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1648_en.pdf diakses 18 Agustus 2013.
- Dano, Elenita. 2008. "Building People Oriented and Participatory Alternative Regionalism Models in Southeast Asia: an Exploratory Study". *AsiaDHRRA*. http://asiadhrra.org/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/alternative_regionalism.pdf diakses 18 Agustus 2013.
- EU Affairs*. 2013. "Overview of the First Phase of the Structured Dialogue on Social Inclusion". http://strukturiertes-dialog.de/fileadmin/00-Daten-Strukturiertes-Dialog/01-Downloads/01a-Downloads_News/Overview_Cyc_3_-_1st_phase_SD.pdf diakses 17 Agustus 2013.
- European Commission*. 2013. "Youth in Action: Programme Guide". http://ec.europa.eu/youth/documents/guide13_en.pdf diakses 17 Agustus 2013.
- European Federation for Intercultural Learning*. 2012. "EU Structured Dialogue with Young People". <http://www.efil.afs.org/advocacy/advocacy-actions/eu-structured-dialogue-with-young-people/> diakses 18 Agustus 2013.
- Fulda, Hochschule. 2011. *EU Youth Policies: The Transition from the Independent "Youth in Action" to the Integrated "Erasmus for All" Program and Its Future Impact on Youth Organizations and Their Work*. Tesis. Leipzig: University of Applied Sciences.
- Gerard, Kelly. 2012. "The ASEAN Civil Society Conference: a 'People-Oriented' ASEAN?". *East Asia Forum*. <http://www.eastasiaforum.org/2012/04/20/the-asean-civil-society-conference-a-people-oriented-asean/> diakses 17 Agustus 2013.

- Inayati, Ratna Shofi. 2007. *Menuju Komunitas ASEAN 2015: Dari State Oriented ke People Oriented*. Jakarta: LIPI.
- Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan*.
- Kanaev, Evgeny. 2013. "ASEAN and the Code of Conduct of Parties in the South China Sea". *Russian International Affairs Council*. http://russiancouncil.ru/en/inner/?id_4=1853#top diakses 17 Agustus 2013.
- Keling, Mohamad Faisol, Hishamudin Md. Som, Mohamad Nasir Saludin, Md. Shukri Shuib, dan Mohd Na'eim Ajis. 2011. "The Development of ASEAN from Historical Approach". *Journal of Asian Social Science* (7): 169-189.
- Koh, Tommy. 2007. "ASEAN at 40: Perception and Reality". *PacNet*, Number 48A. <http://csis.org/files/media/csis/pubs/pac0748a.pdf> diakses 16 Agustus 2013.
- Kwek, Gillian. 2011. "ASEAN – Resilient Growth Ahead despite the Global Slowdown". *Fund Perspective*, June 2011. <http://internetfileserver.phillip.com.sg/Poems/UnitTrust/Fundview/Fid060711ASEAN.pdf> diakses 16 Agustus 2013.
- Mursitama, Tirta N. 2013. "Membumikan Masyarakat Ekonomi ASEAN". *CBDS Commentaries*, April 2013. <http://ir.binus.ac.id/files/2012/07/CBDS-Commentaris-No.-07-2013-Membumikan-masyarakat-ekonomi-ASEAN.pdf> diakses 16 Agustus 2013.
- Lawansiri, Pokpong. 2008. "ASEAN: People-Oriented or Disoriented?". *Philippine Daily Inquirer*. <http://opinion.inquirer.net/inquireropinion/columns/view/20081129-175088/ASEAN-people-oriented-or-disoriented> diakses 17 Agustus 2013.
- Linggarwati, Tundjung. 2012. *ASEAN Socio-Cultural Community: Peluang Bagi Pengembangan Diplomasi Berbasis Kearifan Lokal*. Seminar nasional "Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal". Purwokerto.
- Nesadurai, Helen E. S. 2008. "The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)". *New Political Economy* 13 (2): 225-239.
- Rita, Maria. 2011. "Lima Agenda Penting Dibahas di KTT ASEAN ke-19". *Tempo*. <http://www.tempo.co/read/news/2011/11/17/118367000/Lima-Agenda-Penting-Dibahas-di-KTT-ASEAN-ke-19> diakses 17 Agustus 2013.

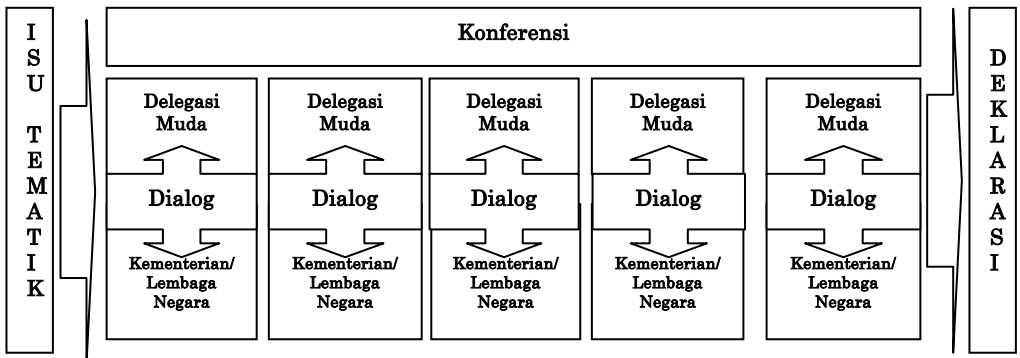
Daftar Bagan

Bagan 1. Asumsi Koordinasi Pusat dan Daerah



Sumber: Diolah oleh penulis.

Bagan 2. Asumsi Penyelenggaraan Konferensi



Sumber: Diolah oleh penulis.